

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial memang tak habis-habisnya menjadi PR besar bagi setiap negara-negara yang ada di dunia baik negara maju, negara berkembang maupun negara sedang berkembang. Menurut Walter A Fridlander yang merupakan salah satu ilmuwan sosial dunia, mengatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Salah satu masalah kesejahteraan sosial adalah kemiskinan.

Kemiskinan sudah menjadi salah satu masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan ini bukan hanya berada pada negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga negara-negara maju yang ada. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks

dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (Matualage Priska, 2015 diakses tanggal 23 Februari 2020, 06:20:23).

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pendapatan ekonomi yang rendah tersebut akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Suharto (2005:132) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup (kesehatan, pendidikan, serta transportasi) serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan yang diukur dari pengeluaran orang tersebut.

Berdasarkan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, pemerintah

melalui Kementerian Sosial menggunakan berbagai program-program dan stimulasi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program pemerintah khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan mengenai masalah kemiskinan adalah dengan adanya program yang disebut Program Bantuan Tunai Bersyarat yang lebih dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dikeluarkan melalui kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di negara Indonesia. Program yang sama ini di negara lain disebut dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau program bantuan bersyarat.

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam BAB I, Pasal (1) Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam BAB I, Pasal (2) Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) tertuang dalam pasal (3) merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial tertuang dalam pasal (5) meliputi:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diatas, meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diatas, meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 93) diatas, meliputi:

- a. Lanjut usia dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat baru berjalan pada tahun 2011, pada tahun 2020 ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding tercatat sebanyak 239 KPM. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pengawasan Kepala Desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan yang belum

sepenuhnya optimal karena masih adanya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap keluarga mampu tetapi menerima program bantuan tersebut.

“Sasaran PKH yang ada di lapangan tidak tepat sasaran, masyarakat berharap adanya pendataan ulang data penerima bantuan PKH agar tepat sasaran sesuai dengan keadaan masyarakat desa” ujar Bapak Sobari selaku Ketua RT 07 Desa Mirat (Sumber: Hasil Wawancara pada tanggal 20 Maret 2020)

Beliau mengatakan secara tidak langsung sebagian besar masyarakat penerima PKH bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Padahal masih banyak warga yang dikategorikan keluarga tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut.

Sebagaimana masih terlihat belum terlaksananya mekanisme pendataan dan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) maka agar penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat optimal maka harus meliputi beberapa faktor seperti halnya pendapat yang dijelaskan oleh Arifin Abdul Rachman (2001:23), mengemukakan ada tiga indikator pengawasan yang menentukan keberhasilan pengawasan yaitu a) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, b) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan c) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis, pengawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding masih belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan suatu masalah yang penulis temukan dan dapat dianalisis secara mendalam adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding
2. Data yang didapat tidak di evaluasi lagi sehingga data itu tidak valid.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul **“Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding”**

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan pengawasan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding?
3. Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding. Adapun tujuan yang dilakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui pengawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan pengawasan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian maka kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan memiliki pengembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama untuk pengawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan, meliputi:

- a) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai pengawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.
- b) Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan pendekatan secara langsung kepada

masyarakat mengenai keluhan yang sebenarnya terjadi di masyarakat miskin.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka terutama kepada kepala Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding dalam melakukan penyempurnaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Pengawasan

Dalam hal penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan pemerintah sering kali memunculkan persoalan dalam melakukan kajian terhadap masalah-masalah publik adalah bahwa tidak semua masalah kajian mendapat tanggapan yang memadai oleh para pembuat kebijakan untuk itu diperlukan pengawasan dari seorang pemimpin.

George R. Terry dalam buku Dasar-Dasar Manajemen (2006:172-173) mengemukakan bahwa:

“control is to determinate what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”. Yang artinya kontrol atau pengawasan adalah untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif jika perlu untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Arifin Abdul Rachman dalam buku Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan (2001: 23), mengemukakan bahwa:

“Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program”.

Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
- a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional.
 - b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

1.6.2 Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6

(enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.6.3 Penyaluran

Penyaluran adalah proses menyalurkan barang, alat pembayaran dan lain sebagainya dari pihak satu ke pihak lain. Penyaluran disini ialah penyaluran bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang berupa materil yang sering dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

1.6.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu program pemerintah khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan mengenai masalah kemiskinan adalah dengan adanya program yang disebut Program Bantuan Tunai Bersyarat yang lebih dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dikeluarkan melalui kementrian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang

merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di negara Indonesia.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam BAB I, Pasal (2) adalah:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Untuk memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan, para peserta diwajibkan memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam komponen

kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

1. Kewajiban komponen kesehatan yaitu:

- a) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun Protokol pelayanan kesehatan bagi para peserta Program Keluarga Harapan ialah *Pertama*, Anak usia 0-6 tahun, Bayi Baru Lahir harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi agar tetap hangat, Vitamin K, HBO, bayi mendapatkan salem mata, ibu dapat mengikuti konseling menyusui. Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak tiga kali (Pemeriksaan pertama yaitu pada 6-48 jam, pemeriksaan ke dua yaitu pada 3-7 hari dan pemeriksaan ke tiga yaitu pada 8-28 hari). Anak usia 0-6 bulan harus diberi ASI eksklusif. Anak usia 0-11 bulan harus di imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) serta ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulannya. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59

bulan perlu untuk mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya. Anak disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. *Kedua*, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali (pemeriksaan sekali pada saat usia kehamilan 0-6 bulan, pemeriksaan sekali pada saat usia kehamilan 4-6 bulan dan dua kali pemeriksaan pada saat kehamilan 7-9 bulan serta mendapatkan suplemen tablet Fc). Pada saat ibu melahirkan harus segera ditolong oleh tenaga kesehatan serta diberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB (Keluarga Berencana) pasca persalinan sebanyak tiga kali pada minggu pertama, minggu ke empat dan minggu ke enam setelah melahirkan.

2. Kewajiban komponen Pendidikan: Para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung

dengan catatan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan atau terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket SMA/MA terbuka) dan kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan atau terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B). Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja atau menjadi pekerja anak

atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yaitu mempersiapkan kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

3. Kewajiban komponen kesejahteraan sosial yaitu: a)

Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan medis melalui kunjungan ke rumah penyandang disabilitas. b) Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau lansia mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di adakan oleh fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan.

Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah lansia tersebut.

1.6.5 Kemiskinan

Menurut Suharto (2005:132) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup (kesehatan, pendidikan, serta transportasi) serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kemiskinan jika dilihat dari akar permasalahannya bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti seseorang yang berpendapatan rendah tetapi kerap kali membeli barang yang mahal dan tidak melihat pendapatan yang diterima, keluarga miskin yang melahirkan anggota keluarga baru sehingga anggota keluarga baru tersebut menjadi tanggungan keluarga tersebut dan beban hidup keluarga tersebut bertambah, dan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa yang mengadu nasib berangkat ke kota metropolitan seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya, tetapi disana mereka hanya menjadi pengangguran.

Kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian akan tetapi menjadi tanggungjawab banyak kementerian yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dan program-program yang pro rakyat miskin. Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang sarannya adalah masyarakat miskin salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan

membuka akses jangkauan kepada masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

1.6.6 Desa

Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang lebih dikenal dengan nama kuwu yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan melalui pemilihan kuwu (pilwu) atau pilkades (pemilihan kepala desa).

1.6.7 Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecaamatan Leuwimunding.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan apa yang hendak dicapai, mengevaluasinya, dan jika perlu seorang pemimpin menerapkan tindakan korektif dengan maksud atau mempunyai tujuan tertentu untuk memastikan hasil sesuai dengan yang rencana yang diinginkan.

Kepala desa adalah seorang pemimpin desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Seorang kepala desa mempunyai masa jabatan yaitu selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Penyaluran adalah proses menyalurkan barang, alat pembayaran dan lain sebagainya dari pihak satu ke pihak lain.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu produk kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk membantu keluarga miskin dalam membiayai

kehidupannya seperti dalam pembiayaan anak sekolah, kesehatan ibu hamil serta ibu yang mempunyai balita serta menjamin kesehatan bagi lansia dan lansia dapat mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungannya.

Menurut Suharto (2005:132) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup (kesehatan, pendidikan, serta transportasi) serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan jika dilihat dari akar permasalahannya bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti seseorang yang berpendapatan rendah tetapi kerap kali membeli barang yang mahal dan tidak melihat pendapatan yang diterima, keluarga miskin yang melahirkan anggota keluarga baru sehingga anggota keluarga baru tersebut menjadi tanggungan keluarga tersebut dan beban hidup keluarga tersebut bertambah, dan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa yang mengadu nasib berangkat ke kota metropolitan seperti Jakarta tetapi disana mereka hanya menjadi pengangguran.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka aspek kajian penelitian yang dilakukan penulis yaitu: Pengawasan dijabarkan kedalam indikator seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Parameter
Indikator Pengawasan (Arifin Abdul Rachman dalam buku Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan (2001: 23))	1. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas	Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
	2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
	3. Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar	1. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya. 2. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan ialah Cara ilmiah, Data, Tujuan, dan Kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis

Menurut Moleong (Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 2016:6) penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penulis melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memenuhi nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan

yang akan diteliti dengan mempelajari bagaimana seseorang individu, suatu kelompok ataupun suatu kejadian. Di dalam penelitian kualitatif manusia adalah instrumen penelitian yang hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif adalah karena penelitian yang digunakan bukan untuk mencari hubungan antar variabel, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan, dan memaparkan berbagai kondisi, situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi sebuah objek penelitian.

Alasan lain memilih metode penelitian kualitatif deskriptif ialah memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, seperti cara berpikir positif (faktor subyektif) diangkat kepermukaan sebagai cara untuk menarik informasi. Hal tersebut mengacu atas sifat kealamiahannya dan sumber data sesuai dengan karakteristik paradigma kualitatif itu sendiri, yaitu:

1. Dilakukan pada latar alamiah,
2. Bersifat deskriptif,
3. Lebih mementingkan proses daripada hasil,
4. Menggunakan analisis induktif dan
5. Pengungkapan makna adalah tujuan esensinya.

1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam Penelitian kualitatif, penelitian tidak menentukan populasi tetapi menentukan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan inilah yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2017:218).

Informan terdiri dari dua macam yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti tersebut, sedangkan informan pendukung adalah orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informan pelengkap atau tambahan.

Berdasarkan uraian diatas, teknik pemilihan informasi dalam penelitian Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding yang digunakan penulis yakni:

1. Informan Kunci dalam penelitian meliputi:
 - a. Kepala Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding
 - b. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Informan pendukung dalam penelitian meliputi:
 - a. Ketua RT 07
 - b. Masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c. Masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ini untuk menghimpun data dan informasi adalah suatu keputusan dan studi lapangan prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi dimana informan melaksanakan tugasnya. Adapun uraian singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tertulis antara lain dengan mempelajari dan membaca buku, dokumen-dokumen, internet serta sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan

Studi lapangan terbagi menjadi dua yaitu Observasi dan Wawancara. Penjelasan mengenai observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

- Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian.
- Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang berada dilokasi penelitian.

c. Dokumentasi adalah bentuk gambar atau foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya penelitian yang bias, maka diperlukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya.

Menurut Moleong (Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 2016:327) terdapat delapan teknik pengujian keabsahan data dalam rangka untuk memperoleh kredibilitas (derajat kepercayaan) yaitu:

a. **Perpanjangan keikut-sertaan** yaitu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

- b. **Ketekunan atau keajegan pengamat** berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamat menyediakan kedalaman.
- c. **Triangulasi** adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- d. **Pemeriksaan sejawat melalui diskusi:** Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

- e. **Analisis kasus negatif** dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.
- f. **Pengecekan anggota** dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam memberikan pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.
- g. **Uraian rinci** yaitu keteralihan bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks pengirim dan konteks penerima. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerima sehingga memungkinkan adanya pembandingan.
- h. **Auditing** yaitu konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan

dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian triangulasi dalam pengujian keabsahan data.

Menurut Moleong (Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 2016:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Menurut Denzin 1978 (Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 2016:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidikan, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan *metode*, menurut Patton Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (2016:330), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan & Biklen 1982 (Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 2016:248) adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan, menyidik, mengumpulkan, menggambarkan data dan menyusun data yang diperoleh dari informan dan data-data penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi serta di bantu dengan keterangan tambahan yang mendukung suatu penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2017:246-253), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya masih jenuh.

Langkah-langkah aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) ialah Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikn gambaran yang jelas, dan mempermudah mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Display Data* (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. *Conculation Drawing atau Verification* (Penarikan kesimpulan dan Verifikasi): Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, tidak akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yag kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah peneliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi (obyek) penelitian dilakukan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding. Dengan mempertimbangkan alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya permasalahan yang harus dicari solusi pemecahannya yaitu masalah yang relevan dengan penelitian tentang penawasan kepala desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.
- 2) Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu lima bulan sejak penelitian ini dibuat dari bulan Mei sampai

dengan bulan Oktober oleh penulis dan layak untuk melanjutkan penelitian skripsi. Bentuk kegiatan yang telah direncanakan untuk dilakukan dalam waktu enam bulan adalah sebagai berikut:



Tabel 2
Jadwal Penelitian

[illegible]